JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online) .....

Peran Akuntan Profesional dalam Mendukung Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Di Kota Padang

Verni Juita[a]

[a]Jurusan Akuntansi, Fakultas EkonomiUniversitas Andalas, vjuita@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah artikel:
Diterima: 6 Mei 2020
Diterima revisian: 30 Agustus 2020
Diterima publikasi: 5 September 2020

Kata Kunci:
Jasa Akuntan Publik, UMKM, pengelolaan keuangan UMKM

ABSTRAK (Times New Roman, Bold, 11pt)

The challenges faced by MSMEs require the support of external parties such as public accounting firms in improving their management. In particular, this study explores KAP's various services to MSMEs in Padang City, including the opportunities and challenges faced by them. Data collection was carried out through a survey with a structured questionnaire addressed to KAP in Padang City. This research is explanatory, and the sampling technique uses purposive sampling method. Data were analyzed using simple descriptive statistical analysis techniques. The results obtained show a wide variety of professional accountant services to MSMEs, such as tax calculation and reporting services, consulting on various business issues, independent auditing accounting services, and making financial reports. Although facing several obstacles such as the difficulty of finding qualified KAP human resources and the lack of SMEs' financial capacity to use professional accountant services, there are still opportunities for management assistance with initiatives from professional accountants, SMEs, and the government in improving MSME management.

1. PENDAHULUAN

Pentingnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah terdokumentasikan dengan baik. UMKM tidak hanya berperan penting dari sisi jumlahnya yang besar tapi juga berkontribusi besar pada pendapatan

nasional dan penyedia lapangan kerja yang besar. Di ASEAN, studi ERIA (2014) menunjukkan UMKM memainkan peranan yang penting dalam integrasi ekonomi ASEAN, karena sekitar 89-99 persen dari perusahaan-perusahaan di negara-negara anggota ASEAN adalah UKM. Secara keseluruhan, UMKM telah menciptakan sekitar 52-97 persen dari lapangan pekerjaan dan berkontribusi sebesar 23-58 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan 10-30 persen dari total ekspor. Khusus di Indonesia, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemen KUKM) yang diakses pada website resminya menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat sekitar 64,2 juta UMKM atau mencakup sekitar 99,9 persen dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Unit-unit UMKM tersebut, mempekerjakan sekitar 116,97 juta pekerja, atau sekitar 97 persen dari total pekerjaan yang terdapat di negara ini.

Terlepas dari peranan penting yang telah dimainkan oleh UMKM tersebut, terdapat kekhawatiran terkait dengan tingginya tingkat kegagalan UMKM, apakah UMKM dapat mencapai pontensinya yang optimal, dan tingkat produktivitas UMKM kurang memuaskan (Birkett, 2000; Mole *et al.,* 2004; Faerns *et al*., 2005). Di Indonesia, hal tersebut misalnya dapat terlihat dari masih rendahnya peranan UKM dalam total pendapatan nasional, ekspor, dan investasi riil. Data Kemen KUKM menunjukkan bahwa sektor UKM menyumbang hanya 57,4 persen terhadap total pendapatan nasional pada 2018, jauh lebih kecil dibanding kontribusinya terhadap total lapangan kerja di tahun yang sama. Pada saat yang sama, hanya 14,37 persen dari total ekspor nasional dan 54,89 persen dari total investasi riil di Indonesia yang berasal dari UKM.

Terdapat banyak hambatan dan tantangan internal dan eksternal yang membuat banyak UMKM gagal untuk tumbuh dan mempertahankan kesinambungan usahanya dalam waktu yang lama. Juita (2016), misalnya, berpendapat bahwa salah satu sebabnya adalah kebanyakan dari pemilik dan pengelola UMKM hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang mereka harus lakukan atau tidak tahu sama sekali bagaimana harus mengatasi masalah dalam mengelola sebuah UMKM. Lebih lanjut, kebanyakan UMKM cenderung gagal karena kurangnya perencanaan, pengetahuan pemasaran, rendahnya keahlian managerial dan kekurangan kompetensi dan kapasitas (Dyer dan Ross, 2008; Kamyabi dan Devi, 2011). Sementara itu, dari perspektif teori sumber daya (*Resource Based* Theory), Evaraert *et* al. (2006; 2007; 2010) berpendapat bahwa UMKM juga kurang memiliki pengetahuan akuntansi untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi secara internal. Selanjutnya, Tlhomola, *et al*. (2010) mengidentifikasikan beberapa faktor yang turut berkontribusi pada kegagalan yang dialami oleh UMKM, diantaranya: beban pajak, kurangnya jaminan (*collateral*) untuk

mendapatkan pinjaman perbankan, keengganan perbankan untuk memberikan pinjaman, penggunaan asset usaha yang kurang, lemahnya manajemen pembiayaan atau pengeluaran usaha.

Di Indonesia, beberapa studi mengenai UMKM juga mengindikasi masalah-masalah serupa dengan yang terjadi di banyak negara lainnya tersebut. Irjayanti dan Azis (2012), misalnya, menemukan bahwa selain persaingan usaha dan harga energi yang tinggi, akses keuangan merupakan salah satu kendala yang paling utama dari sepuluh masalah yang dihadapi oleh UMKM di enam wilayah di Pulau Jawa (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur). Studi mereka menunjukkan bahwa institusi keuangan yang beroperasi tidak memihak UMKM. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kesulitan ketika UMKM mencoba mengajukan pembiayaan kredit dari perbankan akibat rumitnya prasyarat yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM. Mourougane (2012) berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan dari pengelola UMKN dalam mengajukan dan memenuhi prasyarat standar pinjaman yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Dia selanjutnya juga menjelaskan bahwa peminjam UMKM seringkali tidak memiliki rekam jejak dan tidak mampu untuk menyediakan informasi yang terpercaya sehingga meningkatkan resiko pinjaman. Oleh karena itu, menurutnya memperbaiki penyediaan informasi khususnya keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) dapat memfasilitasi akses UMKM kepada pembiayaan.

Dalam konteks ini, peran penyedia jasa pendukung dan pemberi saran tentang bisnis dari pihak eksternal UMKM dipandang sangat penting. UMKM membutuhkan lebih banyak dukungan dan saran-saran tentang bisnis mereka,karena pentingnya peranan UMKM terhadap perekonomian dan kerentanan mereka dari ketidaksempurnaan pasar (Lowe dan Talbot, 2000; Blackburn*et al.,* 2010). UMKM perlu memiliki kompetensi yang cukup agar dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah dengan cepat (Penrose, 1959; Teece *et al.* 1997). Untuk itu UMKM perlu untuk diberdayakan dan diberitahu tentang berbagai fungsi dan tindakan yang meski mereka lakukan, terutama tentang segala hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya keuangan mereka. Berry (2006) berpendapat bahwa efektivitas pertumbuhan UMKM berhubungan erat dengan efektivitas mereka dalam memanfaatkan saran-saran dari pihak eksternal.Dengan memanfaatkan sumber-sumber eksternal, UMKM dapat memperoleh kemampuan dan pengetahuan yang mereka butuhkan (tapi tidak mereka miliki) dari para pihak penyedia jasa eksternal ini (Gilley *et al.,* 2004; McIvor, 2009). Dari sudut pandang teori sumber daya (*Resource Based* Theory), Kamyabi dan Devi (2011) berpendapat dengan

keterbatasan sumberdaya internal yang mereka miliki, menjadi penting bagi UMKM untuk memperoleh berbagai sumber daya dari sumber-sumber eksternal.

Oleh karena itu, selain dukungan dari pemerintah, UMKM perlu untuk memperluas jaringan dan hubungan mereka untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak eksternal, termasuk para akuntan profesional. UMKM membutuhkan jasa dan bantuan akuntan profesional atau akuntan publik bersertifikat (*certified public accountant*) untuk dapat memenuhi peraturan pemerintah terkait dengan pelaporan keuangan, perpajakan, pengupahan karyawan dan lainnya. Lebih dari itu, agar dapat bertahan dalam lingkungan usaha yang makin kompetitif, UMKM butuh untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang mereka miliki. Manajemen UMKM diharapkan mampu menghasilkan dan menyajikan informasi keuangan berkala dan terpercaya untuk semua pengguna, baik itu internal pemilik dan manajemen usaha ataupun para kreditor dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Dalam konteks ini, selain dari unit keuangan dan akuntansi internal mereka sendiri, UMKM butuh dukungan dan saran dari para profesional di bidang keuangan, khususnya perusahaan kantor akuntan publik dan/atau para akuntan publik perorangan yang bersertifikat (*Certified Public Accountants* (CPAs), sebab relatif banyak UMKM yang masih belum sadar atau tahu akan kebutuhan mereka sendiri terkait dengan aspek manajemen keuangan dan akuntansi.

Studi-studi terdahulu mengenai manajemen informasi keuangan dan akuntansi pada UMKM menunjukkan lemahnya kemampuan dan keterampilan pemilik dan pengelola UMKM dalam bidang tersebut. McMahon dan Holmes (1991) menekankan bahwa pemanfaatan laporan-laporan keuangan oleh pemilk dan pengelola UMKM seringkali sangat terbatas. Qashi dan Abadi (2010) juga menemukan bahwa sebagian besar dari alat kelengkapan dari kerangka dasar akuntansi tidak dijumpai dalam sistem informasi akuntansi yang dipakai oleh UMKM di Jordania, sebagaimana tercermin dari kurangnya karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Senada dengan itu, studi yang dilakukan oleh IFC (2006) di Indonesia menemukan bahwa walaupun menyiapkan laporan keuangan merupakan hal yang paling dianggap penting oleh UMKM ketika mengajukan pinjaman, pengelola UMKM, khususnya yang perempuan, seringkali tidak menjaga pemisahan catatan pembukuan dari setiap transaksi bisnis dan rumah tangganya. Lebih jauh lagi, studi tersebut juga menemukan bahwa terdapat indikasi bahwa banyak pengusaha UMKM perempuan yang tidak mau atau tidak dapat menyiapkan laporan keuangan.

Hal serupa juga terjadi pada UMKM di Kota Padang. Studi Juita (2016) pada UMKM sektor perdagangan di Kota Padang, misalnya, menemukan bahwa walaupun sebagian besar dari UMKM terpilih telah melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan mereka, masih terdapat cukup banyak UMKM yang belum atau tidak melakukan pencatatan dan pengelolaan informasi keuangannya secara periodik atau terpisah dengan keuangan pribadi/keluarga pemilik usaha. Lebih lanjut, dia juga menunjukkan bahwa untuk UMKM yang telah melakukan pencatatan dan pembukuan informasi keuangan secara periodik dan terpisah tersebut, kebanyakan praktek pelaksanaannya masih terbatas dan dilakukan langsung oleh pemilik usaha sendiri atau karyawan lainnya yang pada umumnya memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan yang terbatas atau sederhana, sehingga hanya sedikit sekali UMKM yang benar-benar mencatat dan menyimpan seluruh dokumen mengenai aktivitas usaha mereka dan membuat laporan keuangan yang lengkap dan secara keseluruhan sesuai dengan standar akuntansi keuangan formal yang berlaku.

Di sisi lain, studi-studi terdahulu juga telah menemukan bahwa UMKM telah memanfaatkan secara luas berbagai jasa pelayanan yang diberikan akuntan eksternal (Bennett dan Robson, 1999; Gooderham *et al.*, 2004; Carey *et al.*, 2005; Doving dan Gooderham, 2008; Carey dan Tanewski, 2009). Bahkan, akuntan merupakan nara sumber eksternal yang paling sering dimintai saran, lebih dari profesional lain yang bekerja pada bagian hukum perbankan dan penyedia jasa publik lainnya (Bennett dan Robson, 1999; Carey *et al.*, 2005; BIS, 2009). Perkembangan dari studi-studi terkini juga memperlihatkan bahwa para akuntan eksternal ini telah memperluas cakupan jasa pelayanan yang mereka berikan. Para akuntan publik ini tidak lagi hanya sekedar memberikan jasa-jasa tradisional dan umum, seperti bantuan penyiapan atau interpresi data keuangan agar sesuai dengan aturan dan format standar yang berlaku (contohnya: perpajakan, kompilasi dan audit), tapi juga memperluas jasa pelayanannya hingga meliputi berbagai penyediaan jasa-jasa konsultasi bisnis, penyediaan dukungan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan internal dan eksternal (Fogarty *et al.*, 2006; Greenwood *et al.*, 2002). Sementara, Doving *et al.* (2004) membuat daftar beberapa jasa pelayanan non-tradisional yang diberikan oleh akuntan eksternal kepada UMKM, diantaranya: pewarisan/pemindahan kekayaan antar generasi/pengalihan kepemilikan; struktur bisnis; penganggaran; pensiun; pemasaran/pejualan/perencanaan strategis; administrasi rutin/IT; manajemen/ pengorganisasian/Kepegawaian; pelatihan keterampilan; penilaian perusahaan/merger/ demerger.

Bertolak belakang dengan perkembangan tersebut, hingga saat ini hanya terdapat sedikit sekali studi-studi yang membahas tentang peranan yang dimainkan oleh Akuntan Profesional yang terdiri dari kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat (CPAs) terhadap UMKM. Dari yang sedikit tersebut pun, kebanyakan studi hanya membahas tentang apa yang terjadi di negara-negara maju dan kebanyakan juga membahasnya dari sudut pandang UMKM. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mendokumentasikan dan meneliti tentang peranan dan jasa pelayanan yang diberikan oleh Akuntan professional tersebut kepada UMKM di negara berkembang, seperti Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan studi-studi yang terdahulu. Pertama, sejauh pengetahuan penulis, penelitian ini adalah studi yang pertama tentang peranan akuntan Profesional dalam pengelolaan UMKM di Indonesia, khususnya di kota Padang yang merupakan salah satu Kota yang tergolong bukan sebagai kota besar dari sisi ukuran perekonomiannya. Kedua, berbeda dengan kebanyakan studi terdahulu yang seringkali menjadikan UMKM sebagai objek penelitian, penelitian kali ini akan lebih difokuskan pada kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik perorangan yang bersertifikat.

Penelitian ini akan difokuskan kepada peranan yang dimainkan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik perorangan yang bersertifikat dalam manajemen keuangan UMKM di Kota Padang, Sumatera Barat. Secara khusus, studi ini mengeksplor berbagai jasa pelayanan dan dukungan yang disediakan oleh Akuntan Profesional kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik perorangan yang bersertifikat kepada UMKM di Kota Padang, termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi oleh mereka. Berikut adalah beberapa permasalahan yang akan coba ditanyakan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana profile usaha dari kantor akuntan publik dan/ atau akuntan perorangan bersertifikat yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada UMKM di Kota Padang (besaran aset, bentuk badan usaha, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain)?
2. Jenis jasa pelayanan dan dukungan apa saja yang biasanya diberikan oleh kantor akuntan publik dan/ atau akuntan perorangan bersertifikat kepada UMKM di Kota Padang?
3. Apa saja peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada UMKM di Kota Padang? Aspek atau area apa saja yang bisa ditingkatkan dari pelayanan dan dukungan yang diberikan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat kepada UMKM di Kota Padang?

Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan yang dimainkan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat dalam manajemen keuangan UMKM di Kota Padang. Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini:

1. Memperoleh gambaran tentang profil kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada UMKM di Kota Padang.
2. Mengidentifikasikan jenis-jenis pelayanan dan dukungan yang diberikan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada UMKM di Kota Padang
3. Mengidentifikasi peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada UMKM di Kota Padang?
4. Merumuskan rekomendasi dan saran kebijakan yang berguna untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dan dukungan yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat kepada UMKM di Kota Padang
5. Turut berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan literature terkait dangan peranan yang dimainkan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat dalam manajemen keuangan UMKM.

2. TINJAUAN LITERATUR

Bagian ini akan membahas literatur mengenai peranan akuntan profesional dalam mendukung pengelolaan UMKM. Pembahasan terlebih dahulu akan diawali dengan diskusi mengenai definisi dan kriteria UMKM. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada pengertian dari akuntan profesional dan jasa pelayanan yang mereka berikan. Terakhir, peranan akuntan profesional dalam mendukung pengelolaan UMKM.

2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Definisi dan Kriteria

Hingga saat ini, belum ada definisi dan kriteria yang seragam untuk usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di berbagai negara. Literatur akademik yang ada menggunakan definisi yang berbeda-beda untuk UMKM, tergantung negara, institusi, dan individu yang mengemukakannya. Investopedia.com menjelaskan defenisi dan karakteristik UMKM di uni

eropa dan Amerika Serikat. Dimana Uni Eropa mengklasifikasikan Usaha Menengah merupakan perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 250 orang, Usaha Kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 50 orang, sementara Usaha Mikro adalah perusahaan yang mempekerjakan paling banyak 10 Orang karyawan. Sementara Amerika Serikat tidak memiliki ukuran yang kaku untuk mengelompokkan jenis usaha yang termasuk dalam kategori UMKM di berbagai Industri. Sehingga di Amerika the Small Business Administration (SBA) mengklasifikasikan usaha-usaha kecil berdasarkan struktur kepemilikan, jumlah karyawan, laba dan jenis industry. Contohnya pada industry manufaktur Usaha kecil dan menengah di kategorikan bagi perusahaan dengan maksimal 500 Karyawan. Sebaliknya pada bisnis pertambangan batu bara dan Nikel perusahaan yang memiliki jumlah karyawan sampai 1.500 orang masih diidentifikasi masuk dalam kelompok UMKM. Defenisi dan kategori ini sangat mempengaruhi populasi yang digunakan dalam studi terkait UMKM sehingga berbagai perbedaan menganai definisi dan kriteria terkait UMKM tersebut perlu untuk diberikan perhatian lebih ketika menganalisa studi-studi terdahulu yang terkait dengan peranan akuntan profesional dalam mendukung usaha yang dijalankan oleh UMKM.

Di Indonesia, sebagaimana diperlihatkan oleh tabel 1 di bawah ini, terdapat beberapa definisi tentang UMKM yang dikemukakan oleh berbagai institusi dan lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) di dalam mendefinisikan UMKM menurut jumlah pekerja yang diperkerjakan. Definisi ini seringkali digunakan untuk usaha yang beroperasi di sektor manufaktur. Sementara Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemen KUKM) menggunakan nilai dari besaran aset dan penjualan tahunan sebagai kriteria utama untuk mengkategorikan sebuah usaha sebagai UMKM.

Tabel 1: Definisi dan kriteria UMKM

Organisasi	Jenis Usaha	Kriteria
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja 1 - 4 orang
	Usaha Kecil	Pekerja 5- 19 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20 - 99 orang
Bank Indonesia (BI)	Usaha Mikro	- Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin
	(SK Dir BI No 31/21/KEP/DIR, 5 Mei 1998)	- Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana

		- Lapangan usaha mudah untuk entry dan exit
	Usaha Menengah (SK Dir BI No 30/45/KEP/DIR/UK, 5 Januari 1997)	- Aset < 5 Miliar untuk industry - Aset < 600 juta diluar tanah dan bangunan - Omzet tahunan < 3 Miliar
Kementerian Koperasi dan UMKM (UU No. 20 tahun 2008)	Usaha Mikro	- Aset bersih maksimal hingga Rp 50 juta - Hasil penjualan tahunan maksimal hingga Rp 300 juta
	Usaha Kecil	- Aset bersih lebih dari Rp 50 juta hingga 500 juta - Hasil penjualan tahunan: lebih dari Rp 300 juta hingga 2,5 Milyar
	Usaha Menengah	- Aset bersih lebih dari Rp 500 juta hingga 10 miliar - Hasil penjualan tahunan: lebih dari Rp 2,5 miliar hingga 50 Milyar

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.2 Kantor Akuntan Publik and Akuntan Publik Perorangan: Pengertian dan Jasa Pelayanan Profesional yang Diberikan

Istilah "Akuntan profesional" sering disamakan dengan istilah akuntan publik atau akuntan eksternal. Istilah ini biasanya mengacu kepada individu yang memiliki lisensi dan sertifikat yang berlaku sah (*certified public accountant* (CPA)) untuk berpraktek sehingga memungkinkan mereka untuk secara individual bertindak sebagai akuntan publik perorangan atau mendirikan, menjadi mitra usaha dan/atau karyawan pada perusahaan atau kantor yang menyediakan jasa akuntansi, audit, perpajakan dan jasa-jasa lainnya. Individu yang berprofesi sebagai akuntan publik biasanya wajib terdaftar sebagai anggota dari assosiasi akuntan publik di suatu negara.

Pada umumnya tugas seorang akuntan publik berhubungan pembuatan sistem akuntansi, audit, dan perpajakan, walaupun pada prakteknya pada tingkat tertentu mungkin berbeda di tiap negara. Jenis dan cakupan pelayanan jasa akuntansi yang diberikan oleh seorang akuntan profesional atau akuntan eksternal sangat beragam, tergantung dari kapasitas jasa, ukuran usaha, jenis klien/pelanggan, dan wilayah geografi yang menjadi cakupan kerja yang mereka miliki. Secara umum kantor akuntan publik biasanya menyediakan jasa pelayanan yang lebih luas dibandingkan akuntan publik perorangan. Berdasarkan klasifikasi produk utama dari

barang dan jasa yang dibuat oleh United Nations Statistical Division (2014), misalnya, terdapat dua kategori jasa yang berhubungan dengan fungsi seorang akuntan, yaitu: jasa-jasa akuntansi, auditing, dan pembukuan (grup 862) dan jasa-jasa perpajakan (grup 863). Lebih lanjut, pada grup 865 terdapat jasa konsultansi manajemen dimana para akuntan dapat terlibat aktif, khusunya dalam sub-klas yang disebut sebagai jasa konsultansi manajemen keuangan (sub-kelas 86502). Mendoza (2012) mengemukakan bahwa saat ini jasa-jasa pelayanan dan pekerjaan akuntan profesional telah diperluas hingga mencakup beberapa area yang terkait dengan konsultansi manajemen keuangan.

Kantor akuntan publik (KAP) sebagai penyedia jasa akuntansi dapat berbentuk perusahaan perorangan, firma, perseroan terbatas, atau organisasi/badan hukum lainnya yang diizinkan oleh suatu negara. Penyedia jasa akuntan publik profesional secara umum dapat digolongkan menjadi kantor akuntan publik besar, kantor akuntan publik menengah, dan kantor akuntan publik kecil atau perorangan. Kantor akuntan publik besar biasanya melayani perusahaan-perusahaan besar yang tergolong dalam perusahaan multinasional atau perusahaan yang medaftarkan sahamnya di pasar modal. Sementara, kantor akuntan publik menengah dan kantor akuntan publik kecil/akuntan publik perorangan biasanya menyediakan jasa pelayanan pada perusahaan kecil dan menangah (UMKM). Oleh karena itu, biasanya pelayanan jasa akuntansi yang dibutuhkan oleh UMKM biasanya berkaitan erat dengan cakupan jasa pelayanan yang diberikan oleh kantor akuntan publik menengah dan kecil atau akuntan publik perorangan.

Di Indonesia, akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memiliki izin dari kementerian keuangan untuk memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan tentang profesi akuntan publik ini telah diatur di dalam UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Kementrian Keuangan No. 443/KMK.01/2011 mengenai Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi AKuntan Publik Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, setiap akuntan publik wajib menjadi anggota dari asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah, yaitu: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan data dari website IAPI, organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi nasional profesi Akuntan Publik yang diakui di Indonesia. Pembentukan IAPI ditujukan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas, berkompetensi dan berstandar internasional. Karena itu, dalam praktiknya, IAPI terus mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya good governance di Indonesia.

Seorang akuntan yang hendak menjalankan profesi akuntan publik harus mendapatkan izin akuntan publik yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan. Terdapat berbagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Salah satu diantaranya yang paling penting adalah seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang dikeluarkan oleh IAPI. Seorang akuntan yang telah berhasil lulus dalam ujian tersebut berhak memperoleh sebutan "CPA Indonesia", atau sebelum tahun 2007 dkenal dengan sebutan "Bersertifikat Akuntan Publik" atau BAP, yang merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin praktek sebagai akuntan publik dari Kementerian keuangan. Akuntan publik yang memberikan jasanya biasanya wajib mempunyai kantor akuntan publik (KAP) wajib mempunyai kantor akuntan publik (KAP) paling lama 6 bulan sejak izin akuntan publik diterbitkan. Akuntan publik yang tidak memiliki KAP dalam waktu 6 bulan akan dicabut izin akuntan publiknya.

Secara garis besar jasa pelayanan akuntan publik dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi meliputi audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi kuangan profoma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit sertas atestasi lainnya. Sementara, Jasa non-atestasi mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi lainnya.

Berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan tersebut, jasa pelayanan akuntan publik secara lebih rinci dapat dibagi lagi sebagai berikut. Pertama adalah jasa audit umum (*general audit services*), yaitu pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan yang disertai dengan peryataan pendapat mengenai kelayakan penyajian laporan keuangan tersebut. Fokus utama dari audit ini adalah menyajikan satu berkas laporan tahunan yang menyertai suatu laporan audit tahunan kepada investor dan pengguna lainnya. Kedua adalah jasa investigasi (investigation services), yaitu bantuan yang diberikan untuk dapat mengatasi masalah-masalah khusus yang sedang dihadapi oleh manajemen. Jasa ini contohnya meliputi pemeriksaan yang terkait dengan laporan keuangan prospektif (bukan historis), asersi manajemen tentang efektivitas struktur pengendalian entitas internal dan keputusan entitas terhadap perundanan dan peraturan tertentu.

Jasa layanan lanjutan yang ketiga adalah jasa review (*review services*), yaitu permintaan keterangan dari manajemen entintas serta analisis korporatif atas informasi keuangan. Berbeda dengan peryataan positif yang diberikan pada suatu audit, tujuan review adalah untuk

memberikan “keyakinan negative”. Contohnya, hasil dari review adalah pe-review (pihak yang melakukan review) “tidak mendapatkan adanya modifikasi material yang harus dibuat dalam laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku”. Sementara yang keempat adalah jasa-jasa lain yang diberikan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik perorangan, diantaranya: jasa teknologi, konsultasi manajemen, perencanaan keuangan, jasa representasi, jasa pendampingan, serta jasa internasional. Ciri umum dari jasa-jasa ini adalah bahwa jasa ini tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negative, ringkasan temuan, atau bentuk lain dari keyakinan. Namun, jasa-jasa ini juga diberikan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik perorangan yang melakukan audit.

Berikut adalah penjelasan rinci dari berbagai jasa lainnya tersebut. Jasa teknologi (technology services) yang diberikan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik perorangan dapat berbentuk analisis sistem, manajemen informasi, serta pengamanan sistem. Jasa konsultasi manajemen (consultancy or advisory service) adalah nasihat, saran atau bantuan teknis kepada klien mengenai masalah akuntansi, perencanaan keuangan dan lainnya. Jasa ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan penggunaan kemampuan dan sumberdaya mereka dalam mencapai tujuan. Proses konsultasi meliputi perumusan masalah atau peluang, mencari fakta, mengevaluasi alternative, merumuskan rencana serta tindak lanjut.

Sementara, Jasa perencanaan keuangan (financial planning service) meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan analisis laporan keuangan untuk menyusun struktur portofolio investasi serta transaksi keuangan yang kompleks pada suatu usaha. Jasa representasi (*representation* service) adalah jasa untuk dapat mewakili atau menjadi kuasa klien dalam mengurus masalah masalah tertentu, misalnya mengurus masalah perpajakan, pendaftaran efek, perundingan perburuhan dan lain-lain. Jasa pendampingan atau asistensi (assistance services) adalah memberikan bantuan jasa yang bermacam-macam, seperti bantuan dalam pelaksanaan pembukuan, penyususnan sistem yang baru, menyiapkan restitusi pajak dan lain-lain. Terakhir, jasa internasional (*International services*) adalah beragam jasa di atas yang dilakukan lintas negara, sperti perencanaan pajak lintas batas, atau bantuan dalam penyususnan merger ataupun kerjasama multinasional.

2.3 UMKM dan Jasa Akuntan Profesional: Tantangan dan Kebutuhan

Dunia bisnis yang berkembang sangat cepat mempengaruhi kompetisi antar perusahaan menjadi semakin ketat. Setiap perusahaan harus memperkuat kemampuan mereka untuk bisa bertahan dalam kondisi persaingan apapun. Hal ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan

besar, tapi juga dialami oleh perusahaan-perusahaan skala kecil termasuk UMKM. Sama seperti pada usaha besar, sistem informasi akuntansi mempunyai peranan yang penting dalam manajemen organisasi dan pembiayaan usaha UMKM. Manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan UMKM (McMahon dan Holmes, 1991; Gorton, 1999).

Beberapa studi, seperti Juita (2016), memperlihatkan bahwa manajemen/ pengelolaan keuangan yang ceroboh dan buruk merupakan salah satu penyebab terbanyak dari kegagalan UMKM. Terutama dalam menyiapkan informasi keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan operasional dan kinerja operasi mereka. Padahal, adanya kepercayaan umum yang diberikan kepada UMKM didapat dari informasi keuangan mereka yang menyiratkan bahwa pengelolaan informasi keuangan yang baik pada UMKM berarti pengendalian dan pengawasan serta peluang keberhasilan yang tinggi. Dalam rangka mendapatkan kepercayaan tersebut Jayabalan *et al* (2009) mengungkapkan bahwa salah satu fungsi yang dapat membantu UMKM memperkuat kemampuannya untuk bersaing adalah penyiapan informasi keuangan yang bertitik berat kepada pelaporan. Dimana evolusi akuntansi dan penggunaannya yang semakin luas telah memberikan peran yang sangat luas untuk membantu analisa dan perencanaan serta fungsi-fungsi lain yang penting bagi kelansungan operasi perusahaan.

Sayangnya Juita (2016) menambahkan bahwa meskipun hampir seluruh UMKM yang berpartisipasi dalam penelitiannya menganggap informasi keuangan khususnya Akuntansi itu penting, akan tetapi mereka belum mampu untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan dengan baik dikarenakan keterbatasan dalam hal sumberdaya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Pendapat ini sejalan dengan Hasso dan Barbera (2013) yang menggarisbawahi keterbatasan keahlian dan pengetahuan krusial yang dimiliki oleh UMKM terkait pengelolaan keuangan. Solusi yang dinilai tepat untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah menggunakan sumber dari luar. Lebih lanjut Berry et al (2006) dalam Hasso dan Barbera (2013) menyatakan bahwa dari sekian banyak tipe penasehat dan konsultan yang tersedia bagi UMKM, akuntan professional diyakini sebagai penasehat yang paling dapat dipercaya dapat membantu mengatasi kelemahan UMKM dalam membangun kemampuan bersaingnya (Competitive advantage). Hal ini menjadikan profesi akuntan yang awalnya hanya terfokus kepada jasa pencatatan dan pelaporan telah berevolusi menjadi jasa layanan konsultasi yang melibatkan berbagai aspek dalam operasi bisnis. Marriot and Marriot (2000) meyakinkan melalui studi yang mereka lakukan bahwa terdapat banyak potensi yang signifikan bagi akuntan professional untuk memperluas layanan akuntansi mereka mulai dari akuntansi

keuangan sampai akuntansi manajemen yang dapat mereka tawarkan kepada perusahan kecil (UMKM). Mereka.

Pemanfaatan jasa pelayanan oleh akuntan eksternal oleh UMKM telah banyak ditemukan dalam berbagai-studi terdahulu sejak tahun 90an sampai saat ini (Bennett dan Robson, 1999; Gooderham *et al.,* 2004; Carey *et al.,* 2005; Doving dan Gooderham, 2008; Carey dan Tanewski, 2009; Jarvis dan Rigby, 2011). Bahkan, akuntan diyakini sebagai sumber informasi dan konsultasi eksternal yang paling sering dimintai saran, lebih dari profesional lain yang bekerja pada bagian hukum perbankan dan penyedia jasa publik lainnya (Bennett dan Robson, 1999; Carey *et al.,* 2005; BIS, 2009). Sejalan dengan itu, perkembangan dari studi-studi selanjutnya juga memperlihatkan bahwa para akuntan eksternal ini telah memperluas cakupan jasa pelayanan yang mereka berikan. Para akuntan publik ini tidak lagi hanya sekedar memberikan jasa-jasa tradisional dan umum, seperti bantuan penyiapan atau interpresi data keuangan agar sesuai dengan aturan dan format standar yang berlaku (contohnya: perpajakan, kompilasi dan audit), tapi juga memperluas jasa pelayanannya hingga meliputi berbagai penyediaan jasa-jasa konsultasi bisnis, penyediaan dukungan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan internal dan eksternal (Fogarty *et al.,* 2006; Greenwood *et al.,* 2002). Sementara, Doving *et al.* (2004) membuat daftar beberapa jasa pelayanan non-tradisional yang diberikan oleh akuntan eksternal kepada UMKM, diantaranya: pewarisan/pemindahan kekayaan antar generasi/pengalihan kepemilikan; struktur bisnis; penganggaran; pensiun; pemasaran/pejualan/perencanaan strategis; administrasi rutin/IT; manajemen/pengorganisasian/Kepegawaian; pelatihan keterampilan; penilaian perusahaan/merger/demerger.

Dibalik semua manfaat dan keuntungan penggunaan jasa layanan akuntansi dan keuangan bagi UMKM, Jarvis dan Rigby (2011) menyatakan bahwa beberapa penelitian juga mengidentifikasi beberapa kesulitan/kelemahan yang membuat pemanfaatan jasa dan potensi akuntan professional tidak maksimal. Diantaranya adalah pemilik UMKM biasanya tidak memiliki informasi yang cukup tentang jasa yang tersedia serta pemanfaatan jasa dari akuntan eksternal yang tidak optimal. Selain itu terdapat bukti bahwa pemilik atau manajer UMKM memiliki keengganan untuk mencari nasehat atau masukan pihak lain. Blackburn and Hart (2002) dalam Jarvis dan Rigby meyakini penyebab utama dari keengganan tersebut dikarenakan adanya biaya kesempatan (opportunity cost) dari usaha untuk mendapatkan jasa konsultasi, sikap skeptis dari UMKM tentang ketersediaan dari saran yang dibutuhkan, serta

kekhawatiran bahwa menggunakan bantuan dari luar bisa menjadi tanda kelemahan perusahaan.

Akan tetapi Gibb (2000) and Curran (2000) meyakinkan bahwa disamping semua keterbatasan yag telah dibahas sebelumnya, jasa pelayanan dan konsultasi cenderung untuk tetap dilanjutkan dikarenakan UMKM membutuhkannya dan kebanyakan saran dan jasa konsultasi yang diberikan didasarkan kepada pengalaman dan praktek nyata dari perusahaan-perusahaan besar yang diyakini akan sangat membantu bagi UMKM. Ini diyakinkan oleh hasil penelitian Hasso dan Barbera (2013) yang menemukan bahwa akuntan eksternal memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan penjualan dan kemampuan perusahaan kecil dan menengah untuk bertahan. Hal ini dikarenakan tingkat kesesuaian antara jasa akuntansi yang dibutuhkan dengan kebutuhan perusahaan dan pengelola memberikan hasil yang postif bagi kebaikan UMKM.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan penelitian: kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur yang terkait dengan tugas dan peran akuntan professional serta layanan jasa yang mereka tawarkan ke berbagai badan usaha, terutama yang termasuk ke dalam kelompok UMKM. Studi literatur ini dijadikan dasar untuk mendukung dan menyusun kerangka acuan penelitian dan kuesioner survey. Sementara pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survey dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang ditujukan kepada seluruh akuntan professional yang bekerja di kantor akuntan publik di Kota Padang.

Dari pengumpulan studi literatur yang ekstensif dari artikel Jurnal dan laporan terkait mengenai peranan yang dimainkan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat dalam manajemen keuangan UMKM, studi ini merancang kerangka acuan penelitian dan kuesioner untuk survey. Survey tatap muka langsung dengan bantuan kuesioner terstruktur dilakukan kepada seluruh kantor akuntan publik yang terdapat di Kota Padang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel yang tergolong dalam *non-probability sampling* ini sengaja digunakan, karena sifat dari penelitian ini yang lebih kearah memberikan penjelasan (*explanatory research*). Secara khusus tujuan dari hasil penelitian ini bukan dimaksudkan untuk mewakili populasinya, tapi lebih untuk dapat mengeksplorasi dan memberikan gambaran menyeluruh tentang peranan yang dimainkan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada UMKM di Kota

Padang. Pemilihan Kota Padang, beserta kantor akuntan publik yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada UMKM di Kota tersebut sengaja dilakukan dengan alasan untuk membedakan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu. Selain itu, teknik *purposive sampling* ini juga dipilih karena kita tidak benar-benar secara pasti mengetahui berapa besar atau siapa saja populasi dari sampel kantor akuntan yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada UMKM di Kota Padang.

3.1 Proses Pengumpulan Data: Populasi, Sampel, dan Metode Pemilihan Sampel

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan studi literatur yang ekstensif dan survey. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan beberapa penelitian sejenis terdahulu yang meliputi: laporan-laporan penelitian, artikel-artikel jurnal dan buku-buku teks, baik *on-line* ataupun *off-line*. Sedangkan survey dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang ditujukan kepada seluruh 3 (tiga) staff akuntan professional yang bekerja di masing-masing kantor akuntan publik (KAP) yang ada di Kota Padang. Hal ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi konsistensi setiap informasi yang diberikan berkaitan dengan peran dan pelayanan KAP tersebut kepada UMKM. Dari penelusuran melalui google dan pengecekan lokasi kantor, terdapat 7 (tujuh) KAP aktif yang peneliti konfirmasi keberadaannya di Kota Padang. Survey ini menargetkan dapat memperoleh partisipasi dari akuntan aktif pada seluruh KAP tersebut. Akan tetapi hanya 6 (enam) KAP yang bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang diminta dalam penelitian ini.

3.2 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif statistik sederhana untuk menganalisa hasil kuesioner survey. Teknik analisa data tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peranan kantor akuntan publik dan/atau akuntan perorangan bersertifikat yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada manajemen keuangan pada UMKM di Kota Padang. Dalam prakteknya, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dimasukkan dan diolah ke dalam program Microsoft Excel untuk kemudian dianalisa. Data analisa dilakukan dengan menggunakan data statistik deskriptif yang meliputi: frekwensi, persentase, rangking dan rerata. Dari sini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan dan pemanfaatan sistem akuntansi yang terdapat pada UMKM sektor jasa perdagangan di Padang, beserta hambatan dan tantangannya.

4. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari survey dengan menggunakan pertanyaan terstruktur tersebut dipresentasikan secara berurutan sebagai berikut. Pertama, penjelasan tentang profil kantor akuntan public (KAP) yang telah terpilih sebagai sampel. Profil jumlah pegawai (staff professional yang bekerja di KAP tersebut, jumlah staf pendukung jika ada, bentuk badan usaha, status kantor apakah merupakan kantor pusat atau cabang, dan melihat apakah ada afiliasi antara KAP yang berada di padang dengan kantor akuntan yang berada di kota lain. Kedua, pemaparan tentang layanan jasa yang diberikan oleh kantor akuntan kepada UMKM dan bagaimana selama ini pengalaman mereka dalam pemberian jasa tersebut. Ketiga, diskusi mengenai tantangan yang dihadapi oleh akuntan professional dalam pemberian jasa kepada UMKM dan kebutuhan serta peluang apa yang mereka yakini dapat mereka support bagi peningkatan kinerja UMKM.

4.1 Profil Usaha Kantor Akuntan Responden

Gambaran umum yang terkait dengan profil usaha dari responden UMKM yang terpilih menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut. Dari seluruh KAP yang ada di kota padang terdapat 6 kantor akuntan yang bersedia menjadi responden yang selanjutnya akan diberi inisial KAP A, KAP B, KAP C, KAP D, KAP E dan KAP F. Tabel 2 memperlihatkan bahwa bentuk badan usaha dari kantor akuntan responden terdiri dari perorangan dan firma dengan perbandingan 4 firma : 2 perorangan. Sementara dari kedudukan kantornya di Padang terdapat keseimbangan antara perusahaan yang menjadi kantor pusat dan kantor cabang dengan persentase masing-masingnya sebesar 50%.

Tabel 2: Profil Kantor Akuntan Responden

Informasi	KAP A	KAP B	KAP C	KAP D	KAP E	KAP F
1. Bentuk Badan Usaha	Perorangan	Firma	Firma	Firma	Firma	Perorangan
2. Apakah merupakan kantor pusat atau cabang?	Kantor Pusat	Kantor cabang	Kantor cabang	Kantor cabang	Kantor Pusat	Kantor Pusat
3. Jumlah Pegawai professional (akuntan) yang dimiliki	6 Orang	8 Orang	8 Orang	15 Orang	30 Orang	12 Orang
4. Jumlah staf Pendukung (Jika ada)	0 Orang	2 Orang	1 Orang	3 Orang	2 Orang	1 Orang
5. Afiliasi dengan Kantor Akuntan di Kota lain	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Lebih lanjut, dari sisi jumlah pegawai professional yang terlibat dalam pemberian jasa kepada klien jumlahnya antar responden sangat bervariasi dari 6 orang sampai yang terbesar memiliki pegawai professional sebanyak 30 orang. Diantara pegawai professional yang mereka miliki 30% sampai 100% merupakan pegawai tetap, sementara sisanya merupakan pegawai tidak tetap. Selain itu pada umumnya kantor akuntan responden juga mempekerjakan staff pendukung untuk urusan administrasi, kebersihan dan lain-lain dengan jumlah antara 0 – 3 orang. Dan pada kriteria terakhir, dari seluruh kantor akuntan responden yang ada hanya KAP D yang menyatakan memiliki afiliasi dengan kantor akuntan di kota lain yaitu Jakarta.

Selain informasi mengenai kantor akuntan yang menjadi responden, penelitian ini juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan responden pengisi kuesioner yang berjumlah 3 responden untuk masing-masing kantor akuntan. Dari seluruh responden yang ada 88% memiliki latar belakang sarjana akuntansi sebagai pendidikan terakhirnya, sementara 11% lainnya memiliki pendidikan terakhir pada level D3. Selain itu Posisi responden pengisi kuesioner pada kantor akuntan tempat mereka bekerja terdiri dari 2 orang (11%) supervisor, 10 Orang (56%) auditor dan 6 orang (33%) auditor junior. Sementara dari perbandingan gender cukup berimbang dengan 56% responden berjenis kelamin laki-laki dan 44% berjenis kelamin perempuan.

Tabel 3: Profil Responden Pengisi Kuesioner

Informasi responden			**Total**
Pendidikan Terakhir	S1: 88%	D3: 11%	100%
Posisi pada perusahaan	Supervisor: 11% Auditor: 56% auditor junior : 33%		100%
Jenis kelamin	Laki-laki: 56%	Perempuan: 44%	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dari tabel tersebut, terlihat pemerataan responden staf yang berpartisipasi pada penelitian ini dari sisi gender, sementara mayoritas latar belakang responden yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjananya memberikan keyakinan mengenai pemahaman dan penguasaan keahlian mereka mengenai proses pengelolaan dan pencatatan keuangan terhadap klien.

4.2 Layanan Jasa Akuntan Profesional bagi UMKM dan Pelaksanaannya

Sebagian besar kantor akuntan yang diteliti memberikan variasi pemberian layanan jasa yang cukup luas bagi UMKM. Hal ini didasari data sebagian besar klien dari kantor akuntan responden yang terdiri dari usaha kecil dan menengah. Dari data yang diberikan oleh

responden, Lima kantor akuntan responden mengakui melayani Usaha kecil dan menengah dengan persentase 40% - 100% dari total kliennya. Sementara hanya satu kantor akuntan yang melayani 10% klien kategori UMKM, sementara 90% klien mereka yg lain terdiri dari usaha besar. Secara rinci, terdapat 6 jenis layanan jasa yang diakui oleh responden sebagai layanan utama bagi klien UMKM mereka. Pada tabel 4 di bawah dapat dilihat secara detail kantor akuntan yang memberikan ke 6 jasa bagi klien mereka.

Tabel 4: Jenis Layanan Jasa Bagi UMKM

Jenis Jasa yang diberikan bagi UMKM	KAP A	KAP B	KAP C	KAP D	KAP E	KAP F
Jasa penghitungan, pelayanan dan pelaporan Pajak	Ya	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Jasa Konsultasi untuk berbagai masalah bisnis	Ya	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Jasa audit independen (terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jasa audit secara umum	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jasa Audit internal	Ya	-	-	Ya	Ya	Ya
Jasa Pencatatan, pembukuan dan pembuatan laporan keuangan	Ya	Ya	-	Ya	Ya	Ya

Sumber: Diolah oleh penulis

Jasa yang diberikan oleh seluruh kantor akuntan kepada klien usaha kecil dan menengah adalah jasa audit independen yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini diperlukan khususnya bagi usaha menengah yang memiliki stakeholder luar yang memerlukan kepastian akurasi dan integritas dari laporan keuangan yang mereka hasilkan. Selain itu jasa penghitungan, pelayanan dan pelaporan pajak serta jasa konsultasi untuk berbagai masalah bisnis yang dihadapi pelaku usaha juga merupakan jasa yang banyak diberikan kepada UMKM, terlihat dari 5 kantor akuntan memiliki pengalaman memberikan jasa tersebut kepada klien Usaha kecil dan menengah mereka. Hanya satu kantor akuntan yaitu KAP B yang tidak menyediakan kedua layanan tersebut. Sejalan dengan itu, jasa pembukuan dan pembuatan laporan keuangan juga sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, dimana 5 kantor akuntan memiliki pengalaman memberikan jasa tersebut kepada klien mereka dan hanya KAP C saja yang tidak memberikan layanan jasa yang dimaksud. Hasil yang tidak jauh berbeda terlihat pula untuk jasa audit secara umum (termasuk didalamnya audit kinerja, kepatuhan, dll), diakui oleh 5 kantor akuntan responden diberikan kepada klien mereka yang

bukan usaha besar, sementara hanya KAP A saja yang tidak memasukkan jenis layanan ini dalam layanan jasa yang diberikan kepada klien UMKM mereka.

Jenis jasa yang permintaannya tidak sebagus layanan jasa sebelumnya adalah jasa audit internal. Terlihat dari tabel bahwa terdapat 2 kantor akuntan tidak memiliki pengalaman memberikan jasa tersebut yaitu KAP B dan KAP C. Hal ini dimungkinkan oleh pelaksanaan audit internal yang dianggap belum terlalu dibutuhkan bagi kelansungan usaha kecil dan menengah terutama jika dilihat dari urgensi dan besaran biaya yang akan dikeluarkan. Selain jenis jasa yang diberikan, penelitian ini juga ingin menggali pelaksanaan pemberian jasa tersebut oleh kantor akuntan kepada klien usaha kecil dan menengah mereka mulai dari frekuensi pemberian jasa, jumlah personel yang diturunkan, serta apakah terdapat kolaborasi dengan pihak eksternal pada penugasan pada usaha klien. Detail sebaran pelaksanaan pemberian jasa kepada klien UMKM oleh KAP responden diuraikan pada table berikut:

Tabel 5: Pelaksanaan Pemberian jasa kepada UMKM

Pelaksanaan Pemberian jasa kepada UMKM	**KAP A**	**KAP B**	**KAP C**	**KAP D**	**KAP E**	**KAP F**
Frekuensi konsultasi dan permintaan jasa	Bulanan	Tahunan	Tahunan	Mingguan dan per 3 Bulan	Bulanan dan Tahunan	Bulanan
Jumlah Personel yang dturunkan kepada setiap penugasan pada klien UMKM	1-3 Orang	1-6 Orang	1- lebih dari 6 Orang	1-6 Orang	1-3 Orang	1-6 Orang
Apakah terdapat keterlibatan pihak eksternal dalam pemberian jasa tersebut	Institusi Pemerintah dan Kantor Hukum	Institusi Pemerintah dan Kantor Hukum	Institusi Pemerintah dan institusi lain	Institusi Pemerintah	Institusi Pemerintah	Institusi Pemerintah dan Bank

Sumber: Diolah oleh penulis

Pada tabel 5 diatas terlihat bahwa KAP A mendapatkan frekuensi konsultasi dan pemberian jasa setiap bulan dengan menugaskan jumlah personel antara 1-3 orang. Selain itu pada beberapa penugasan mereka juga harus berhubungan dengan institusi pemerintah yang terlibat. Sementara itu KAP B memiliki frekuensi konsultasi dan pemberian jasa secara tahunan. Data yang terkumpul menjadi lebih besar dan variasi jumlah personel yang ditugaskan antara 1 sampai enam orang. Dalam penugasannya terkadang terdapat keterlibatan pihak eksternal berupa institusi pemerintah seperti kantor Pajak dan juga kantor hukum.

Tidak jauh berbeda dengan KAP B, kantor akuntan C juga memberikan jasa secara tahunan dengan penugasan jumlah personel yang terkadang lebih besar. Terlihat dari jumlah personel yang diturunkan mulai dari 1 orang sampai lebih dari 6 orang jika layanan yang diberikan lebih luas dan ukuran usaha yang ditangani juga cukup besar. Sementara keterlibatan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang tidak disebutkan secara detail juga diakui responden ditemui pada beberapa penugasan. Pada KAP D, mereka mendapatkan frekuensi konsultasi dan permintaan jasa yang cukup sering yaitu setiap minggu atau pertiga bulan pada jasa yang berbeda. Jumlah personil yang mereka tugaskan tidak selalu sama untuk setiap penugasan dengan jumlah antara 1 sampai 6 orang. Pada beberapa penugasan mereka juga harus berhubungan dengan instansi pemerintah.

Sementara KAP E, menyebutkan bahwa permintaan jasa dan pemberian layanan pada UMKM biasanya mereka berikan setiap bulan dengan jumlah personel yang mereka tugaskan antara 1- 3 orang. Sementara dalam penugasannya mereka juga mengakui ada pihak eksternal yang terlibat yaitu instansi pemerintah. Tidak jauh berbeda dengan kantor akuntan lainnya, KAP F menerima permintaan konsultasi dan pemberian jasa setiap bulan, dengan jumlah variasi personel yang ditugaskan antara 1 sampai 6 orang. Pada penugasannya, selain terdapat keterlibatan instansi pemerintah terkadang mereka juga harus berhubungan dengan pihak Bank.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan konsultasi dan penugasan pada UMKM berjalan secara rutin dengan mayoritas frekuensi nya dilakukan setiap bulan. Sementara dikarenakan skala usaha yang masih kecil, penugasan dari masing- masing kantor akuntan melibatkan 1-6 personel. Pada beberapa penugasan kantor akuntan public juga butuh berkomunikasi dengan pihak luar seperti kantor hokum, institusi pemerintahan ataupun Bank. Ini berkemungkinan terkait dengan aktivitas perizinan, pajak ataupun pendanaan.

4.3 Tantangan dan kebutuhan akan akuntan professional bagi UMKM dimasa datang

Berdasarkan data yang ada, studi ini menemukan bahwa walaupun secara umum layanan jasa yang diberikan sangat luas dan variatif, namun masih banyak ruang tersedia yang dapat digunakan oleh kantor akuntan dalam membantu pelaksanaan usaha UKM yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari segi waktu yang masih tersedia secara luas karena frekuensi pemberian jasa yang masih cukup longgar. Pada beberapa kantor akuntan pemberian jasa menumpuk secara tahunan saja, sehingga berkemungkinan pada waktu lainnya staff dapat dimanfaatkan bagi kepentingan lain untuk UKM. Begitu juga dari jumlah personel yang masih cukup sedikit diturunkan dalam setiap penugasan, dengan penambahan permintaan jasa dari UKM, kantor

akuntan juga memiliki kesempatan untuk menambah jumlah personil. Belum optimalnya dukungan dari kantor akuntan professional bagi pelaku usaha kecil dan menengah diyakini dikarenakan masih banyaknya hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pemberian dukungan jasa dan layanan pada UMKM. Berbagai hambatan dan kendala tersebut secara rinci terlihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6: Tantangan yang dihadapi oleh akuntan professional dalam mendukung UMKM di kota Padang

Masalah, Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kantor akuntan professional dalam memberikan pelayanan kepada UMKM	Jumlah KAP Responden yang memilih
Modal Kantor Akuntan yang Kecil	3
Sulitnya mencari SDM yang berkualitas	4
Minimnya daya beli atau kemampuan UKM untuk menggunakan jasa kantor akuntan	5
Peraturan pemerintah yang belum mendukung	5

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari data di tabel tersebut, terlihat bahwa masalah dan hambatan yang dihadapi oleh kantor akuntan profesional dalam mengelola system informasi akuntansinya meliputi: Modal kantor akuntan yang kecil, sulitnya mencari Sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya daya beli atau kemampuan UKM untuk menggunakan jasa kantor akuntan serta peratutan pemerintah yang diyakini belum mendukung pendampingan dan pemberian jasa oleh akuntan professional kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Semua kendala tersebut kebanyakan berpangkal atau diakibatkan oleh kurangnya permodalan dan sumberdaya keuangan yang dimiliki oleh UMKM untuk mendapatkan bantuan secara administrative dari pihak eksternal. Keterbatasan sumberdaya manusia dan keuangan yang dimiliki oleh UKM membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan administrasi berkaitan keuangan secara mandiri, meskipun kemampuan mereka sangat terbatas dalam hal ini.

Selain tantangan diatas, salah satu pemilik Kantor Akuntan Publik memberikan penekanan bahwa cara pandang dan pola pikir pelaku UMKM juga mendorong sulitnya pelaksanaan administrasi keuangan yang baik:

”*… kurangnya kesadaran dari pelaku UMKM bahwa administrasi yg baik, tertib, akuntabel dan auditable akan sangat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya,*

serta cara pandang pelaku UMKM bahwa administrasi yg baik tidak terkait langsung dgn laba yg diperoleh merupakan hambatan/pendapat yg perlu dihilangkan dari pelaku UMKM".

4.4 Peluang bagi akuntan professional dalam pemberian layanan dan dukungan kepada UMKM di kota Padang

Selain tantangan dan hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, para responden meyakini bahwa masih terdapat banyak peluang pemberian layanan jasa bagi Usaha Kecil dan menengah yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat pada tabel 7 dibawah ini yang melihat adanya peluang yang disampaikan oleh seluruh responden untuk pemberian berbagai jasa terkait pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan. Berbagai jenis jasa tersebut yang berpotensi untukditawarkan kepada UMKM di masa yang akan datang yaitu : Jasa Konsultasi Bisnis dan Perpajakan, Jasa kompilasi dan audit, Pendampingan dan konsultasi aktivitas akuntansi mulai dari pencatatan sampai pelaporan dan penyusunan Laporan Keuangan, Jasa Penilaian kesehatan keuangan UMKM, Pelatihan dalam pengitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak dan pemberian Pelatihan pelaksanaan aktivitas akuntansi sesuai dengan standard yang berlaku dalam rangka mendorong kemandirian UKM dalam pelaksanaannya.

Semua jasa dan layanan diatas memiliki peluang untuk dimanfaatkan di masa datang dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kemampuan UMKM yang jauh lebih baik. Terutama jika mendapatkan inisiatif dan dukungan dari pihak lain seperti pemerintah.

Tabel 7: Peluang dalam pemberian layanan kepada UKM di masa datang

1. Jasa Konsultasi Bisnis dan Perpajakan
2. Jasa kompilasi dan audit
3. Pendampingan dan konsultasi aktivitas akuntansi mulai dari pencatatan sampai pelaporan dan penyusunan Laporan Keuangan
4. Jasa Penilaian kesehatan keuangan UMKM
5. Pelatihan dalam pengitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak
6. Pelatihan pelaksanaan aktivitas akuntansi sesuai dengan standard yang berlaku dalam rangka mendorong kemandirian UKM dalam pelaksanaannya

Sumber: Diolah oleh penulis

Semua jasa yang disebutkan diatas diyakini memiliki peluang yang sangat besar untuk ditawarkan kepada UMKM. Salah satu pemilik KAP menyatakan bahwa: "mengingat semakin

menjamurnya jumlah pelaku UMKM yg mayoritas berasal dari usaha masyarakat merupakan potensi yg perlu digarap dan perlu diberikan pembinaan perlunya penyusuan administrasi yg akuntabel dan auditabel". Selain itu salah satu staf KAP yang diwawancarai menyebutkan pentingnya memberikan pelatihan dan pendampingan berkala agar tercapai kemandirian bagi setiap UMKM dalam mengelola administrasi dan pelaporan keuangan usaha mereka, dalam rangka tertib administrasi dan pembukuan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi jasa layanan yang dapat diberikan oleh akuntan professional terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait administrasi keuangan. Hal ini diyakini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM tersebut dalam menyediakan informasi menyeluruh mengenai profil usahanya terhadap pihak yang berkepentingan terutama dalam hal pendanaan dan permodalan. Selain itu juga akan membantu mereka dalam evaluasi operasional dan perencanaan bisnis jangka panjang.

Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif sederhana, studi ini mendapatkankan beberapa temuan berikut. Pertama, mayoritas kantor akuntan melayani klien UMKM dengan persentasi yang cukup besar antara 40%-100%. Sementara jasa yang rutin diminta oleh klien mereka cukup lengkap dan variatif, mulai dari jasa pencatatan dan pembukuan keuangan, jasa penghitungan, pelayanan dan pelaporan pajak, jasa konsultasi untuk berbagai masalah bisnis, jasa audit baik umum maupun spesifik seperti jasa audit atas laporan keuangan. Sementara frekuensi pemberian jasa kepada UMKM rata-rata dilakukan secara bulanan, per tiga bulan maupun tahunan.

Sementara itu kendala utama yang dirasakan oleh Kantor akuntan dalam memberikan jasa kepada kliennya dari usaha kecil dan menengah ini adalah nilai jasa (tariff) yang diberikan sangat terbatas dikarenakan rendahnya daya bayar UMKM. Kebanyakan mereka masih mengandalkan kerjasama dan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan layanan tersebut. Selain itu belum ada kewajiban yang tertuang dalam peraturan pemerintah untuk rutin melaporkan kondisi keuangannya. Dilain pihak kantor akuntan pun tidak bisa menawarkan pilihan tariff yang fleksibel dikarenakan modal mereka yang masih kecil dan jumlah sumber daya mereka yang juga masih terbatas.

Dibalik keterbatasan yang ada, kantor akuntan professional meyakini luasnya peluang bagi pemberian jasa-jasa berikut kepada UMKM di masa yang akan datang yaitu : Jasa Konsultasi Bisnis dan Perpajakan, Jasa kompilasi dan audit, Pendampingan dan konsultasi aktivitas

akuntansi mulai dari pencatatan sampai pelaporan dan penyusunan Laporan Keuangan, Jasa Penilaian kesehatan keuangan UMKM, Pelatihan dalam pengitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak dan pemberian Pelatihan pelaksanaan aktivitas akuntansi sesuai dengan standard yang berlaku dalam rangka mendorong kemandirian UKM dalam pelaksanaannya. Semua jasa dan layanan diatas memiliki peluang untuk dimanfaatkan di masa datang dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kemampuan UMKM yang jauh lebih baik. Terutama jika mendapatkan inisiatif dan dukungan dari pihak lain seperti pemerintah.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, studi ini memandang perlu mendorong pihak penyedia layanan akuntansi dan bisnis untuk bekerjasama dengan pemerintah kota dan provinsi untuk melakukan program penyediaan layanan dan juga pelatihan atau pendidikan yang terjangkau luas untuk para pelaku UMKM berupa Jasa Konsultasi Bisnis dan Perpajakan, Jasa kompilasi dan audit, Pendampingan dan konsultasi aktivitas akuntansi mulai dari pencatatan sampai pelaporan dan penyusunan Laporan Keuangan, Jasa Penilaian kesehatan keuangan UMKM, Pelatihan dalam pengitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak dan pemberian Pelatihan pelaksanaan aktivitas akuntansi sesuai dengan standard yang berlaku. Di samping itu, terbuka juga peluang untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan kepada UMKM yang ingin membuat sistem informasi akuntansi atau UMKM yang membutuhkan penilaian/pemeriksaan dari praktek pelaksanaan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang telah mereka jalankan selama ini.

Di samping temuan-temuan di atas, perlu dicatat penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dikarenakan keterbatasan informasi dan sumber daya yang dimiliki penulis, penelitian ini hanya dilakukan pada enam KAP di Kota Padang. Oleh karena itu, akan lebih baik bila penelitian-penelitian selanjutnya terkait topik ini cakupannya di perluas dengan menambah jumlah sampel dan lokasi kantor akuntan professional yang menyebar wilayahnya ke kota/kabupaten lain di Sumatera barat atau bahkan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia.

Kedua, penelitian ini belum menggali keseimbangan informasi mengenai kebutuhan dan penyediaan jasa layanan dari dua pihak yaitu penyedia jasa (kantor akuntan professional) dan pengguna jasa (UMKM) yang ada di Kota Padang Sumatera Barat. Konsekuensinya, eksplorasi lebih lanjut pada penelitian-penelitian berikutnya akan sangat diperlukan untuk memperkaya dan meningkatkan pemahaman tentang jenis dan kualitas layanan ataupun pendampingan yang dapat disediakan secara mandiri oleh kantor akuntan professional kepada UMKM

REFERENSI

Barbera, Francesco, and Hasso, Tim. (2013). " Do We Need to Use an Accountant? The Sales Growth and Survival Benefits to Family SMEs." Family Business Review XX (X) 1-22

Bennett, R.J. and Robson, P.J. (1999). "The use of external business advice by SMEs in Britain." Enterprise and Regional Development11:155-180.

Berry, A. (2006).Banks, SMEs and Accountants: An International Study of SME's Banking *Relationships,* ACCA research report no. 95 (London: Certifed Accountants Educational Trust).

Berryman, J. 1983. "Small Business Failure and Bankruptcy: A Survey of the Literature," European Small Business Journal, 1(4), pp. 47-59.

Birkett, W. P. (2000).*Setting Strategic Directions in Small and Medium Enterprises: A Guide for Professional Accounting Advisers (Part 1)* (New York: IFAC Financial and Management Accounting Committee).

Blackburn, R., Carey, P., & Tanewski, G. A. (2010). *Business Advice to SMEs: Professional Competence, Trust and Ethics. Certified Accountants Educational Trust.* The Association of Chartered Certified Accountants, 29 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3EE. ISBN: 978-1-mi85908-465-6.

Carey, P., Simnett, R., & Tanewski, G. (2005). *Providing Business Advice for Small to Medium Enterprises.* Melbourne: CPA Australia.

Doving, E., Gooderham, P. N., Morrison, A., & Nordhaug, O. (2004). "Small Firm Accountants as Business Advisers: Accounting for the Di erences in their Provision of Business Advisory Services in Norway and Scotland."*SNF Working paper* No. 11 (Bergen: Samfunns-OG Naeringslivsforskning av)

Doving, E., & Gooderham, P. N. (2008). "Dynamic capabilities as antecedents of the scope of related diversification: the case of small firm accountancy practices."*Strategic Management Journal,* 29(8), 841–857.

Dyer, L.M. & Ross, C.A. (2008)." Seeking advice in dynamic and complex business environment: Impact on the success of small firms."*Journal of Development Entrepreneurship,* Vol.13(2), 133-149.

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). (2014). *ASEAN SME Policy Index 2014: Towards Competitive and Innovative ASEAN SMEs.* ERIA Research Project Report 2012, No. 8. Jakarta: ERIA

Evaraert, P., Sarens, G., & Rommel, J. (2006). "Outsourcing of accounting tasks in SMEs : an extended TCE *Model (Working Paper No. 2004/403). Gent* : Univeersiteit Gento.

Evaraert, P., Sarens, G., & Rommel, J. (2007). "Sourcing strategy of Belgian SMEs : empirical evidence for the accounting services."*Production Planning & Control,* 18(8), 716-725.

Evaraert, P., Sarens, G., & Rommel, J. (2010). Using transaction cost economics to explain outsourcing of accounting. *Small Bus Econ,* 35(1),

Faerns, D., Sels, L., De Winne, S. & Maes, J. (2005). "The Effects of Individual HR Domains on Financial Performance: Evidence from Belgian Small Businesses."*International Journal of Human Resource Management,* 16 (5): 676–700.

Fogarty, T.J., Radcliffe, V.S., &Campbell, D.R. (2006), "Accountancy Before the Fall: The AICPA Vision Project and Related Professional Enterprises." *Accounting, Organizations and Society*, 31(1): 1–25.

Gilley, K. M., Greer, C. R., & Rasheed, A. A. (2004). Human resource outsourcing and organizational performance in manufacturing firms. *Journal of Business Research*, 57, 232-240.

Gooderham, P. N., Tobiassen, A., Doving, E., & Nordhaug, O. (2004). "Accountants as sources of business advice for small firms."*International Small Business Journal,* 22(1), 5-22.

Gorton, M. 1999. "Use of Financial Management Techniques in the U.K.-Based Small and Medium Enterprises: Empirical Research Findings," *Journal of Financial Management and Analysis*, 12(1), pp. 56-64.

Greenwood, R., Suddaby, R. & Hinings, C.R. (2002) "Theorizing change: The role of professional associations in the transformation of institutional fields." *Academy of Management Journal.* 45(1):58–80.

Hall, G.andYoung, B. 1993. "Factors Associated with Small Firm Insolvency," inAtkin,R.,Chell,E. and Mason, C. (eds.) *New Directions in Small Business Research*, Avebury; Aldersh.

International Finance Cooperation, IFC. (2006). "Access to Credit for Businesswomen in Indonesia." *IFC-Pensa*, World Bank, Indonesia.

Iriayanti, M. & Azis, M. (2012)."Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs." *Procedia Economics and Finance* 4, pp. 3-12.

Jayabalan, J., Raman, M., Dorasamy, M., & Ching Ching, N. K., (2009). "Outsourcing of Accounting Functions amongst SME Companies in Malaysia: An Exploratory Study."*Accountancy Business and the Public Interest*, Vol. 8, No. 2, 2009, 96-114

Kamyabi, Y. & Devi, S. (2011). Accounting outsourcing and firm performance in Iranian SMEs. *International Journal of Economics and Finance.* Vol. 3. No.4. 181-192.

Kamyabi, Y. & Devi, S. (2011). "Use of profesional accountants' advisory services and its impact on SME performance in an emerging economy : a resource-based view."*Journal of Management and Suistainability.* Vol.13. No.1. 43-55.

Kirby, D. and King, S. (1997). "Accountant and Small Firm Development: Filling the Expectation Gap." *The Service Industries Journal,* 17 (2): pp. 294 – 304.

Lowe, P., & Talbot, H. (2000). *Providing advice and information in support of rural microbusinesses.* University of Newcastle, Centre for Rural Economy.

Marriott, N. and Marriott, P. (2000) 'Professional Accountants and the Development of a Management Accounting Service for the Small Firm: Barriers and Possibilities', *Management Accounting Research* 11(4): 475–92.

McIvor, R. (2009). "How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation."*Journal of Operations Management,* 27, 45-63.

McMahon, G.P., &Holmes, S. 1991. "Small Business Financial Managemen Practices in North America: A Literature Review", *Journal of Small Business Management,* April, 29(2), pp. 19-30.

Mendoza, Rufo R. (2012). Accountancy research theory and practice. Manila, Philippines: Domdane Publishers Mendoza, Rufo R. (2013). *Glimpses: the Philippine accountancy profession at a glance*. Manila, Philippines: Allen Aldrin Books, Inc.

Mole, K. F., Ghobadian, A., O'Regan, N. and Liu, J. (2004). "The Use and Deployment of Soft Process Technologies within UK Manufacturing SMEs: An Empirical Assessment Using Logit Models." *Journal of Small Business Management*, 42 (3): 303–24.

Mourougane, A. (2012). "Promoting SME Development in Indonesia." *OECD Economics Department Working Papers* No. 995.

Peacock, R.W. 1985. "The Small Business Finance Function," *The Australian Accountant*, 55(1), pp. 42-48.

Penrose, E. T. (1959). *The Theory of the Growth of the Firm*. New York: John Wiley

Teece, D. J., Pisano, G., and Shuen, A. (1997). "Dynamic Capabilities and Strategic Management." *Strategic Management Journal*, Vol. 18, No. 7: 509–533

Tlhomola, S.J., E.M. Rankhumise, & B.J. van Niekerk. (2010). "Perceptions of small, medium, micro entrepreneur regarding factors contributing to failure: A Case of Tshwane Metropolitan Municipality. "

United Nations Statistics Division. (2014). Classifications Registry. New York, USA. Diakses September 2016 from http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=86

Website Badan Pusat Statistik (BPS). Diakses 1 September 2016, alamat website: https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/170

Website Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Diakses tanggal 1 September 2016, Alamat Website: http://iapi.or.id/detail/146-Visi-Misi

UU UMKM no. 20 Tahun 2008. Diakses 20 Februari 2015, alamat website: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129